

Perancangan Tayangan Infografis dan Layout Tempat Duduk Pada Rapat Paripurna Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Design of Infographic Displays and Seating Layouts at the Plenary Meeting of Members of the Indonesian House of Representatives for the 2024-2029 Period

Agnes Pratiwi ¹, Almira Shabrina ²

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom , Indonesia,
agnespratiwi@student.telkomuniversity.ac.id

² , Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom , Indonesia,
shabrinaalmira@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tahun 2024 merupakan masa krusial bagi DPR RI karena pada waktu tersebut terjadi pembahasan isu-isu strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan pemerintahan. Pada tahun tersebut, terjadi masa – masa transisi dari Anggota Legislatif Periode 2019 – 2024 ke Anggota Legislatif Periode 2024 – 2029 sehingga membutuhkan proses penyesuaian termasuk dalam Rapat Paripurna DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lembaga legislatif Indonesia. Salah satu aspek penting dalam mendukung jalannya Rapat Paripurna adalah penyampaian informasi secara visual, baik melalui tayangan infografis maupun melalui pengaturan tata letak tempat duduk kursi Anggota DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tayangan infografis dan *layout* tempat duduk pada Rapat Paripurna anggota DPR RI Periode 2024–2029 guna meningkatkan efektivitas komunikasi melalui tayangan infografis dan *layout* tempat duduk Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang profesional dan tidak memihak berlandaskan teori komunikasi nonverbal. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa tayangan infografis yang memperhatikan prinsip komunikasi non verbal menghasilkan infografis yang informatif, profesional, dan netral. Sementara tata letak tempat duduk yang disusun dengan mempertimbangkan aspek komunikasi nonverbal dapat menghasilkan susunan *layout* yang dapat diterima seluruh fraksi sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi.

Kata kunci: Komunikasi Nonverbal, Rapat Paripurna, Desain Tata Letak, DPR RI

Abstract

The year 2024 is a crucial period for the Indonesian House of Representatives because at that time there will be discussions on strategic issues that have a broad impact on society and government. In that year, there will be a transition period from Legislative Members for the 2019-2024 Period to Legislative Members for the 2024-2029 Period, so that an adjustment process is needed, including in the Plenary Meeting of the Indonesian House of Representatives. The Plenary Meeting of the Indonesian House of Representatives is the highest decision-making forum in the Indonesian legislative institution. One important aspect in supporting the Plenary Meeting is communicating information visually, either through infographic displays or through the arrangement of the seating layout of the Indonesian House of Representatives members. This study aims to design infographic displays and seating layouts at the Plenary Meeting of the Indonesian House of Representatives Members for the 2024-2029 Period in order to increase the effectiveness of communication through professional and impartial infographic displays and seating layouts for the Indonesian House of Representatives Members for the 2024-2029 Period based on non-verbal communication theory. Data collection methods used include observation, interviews, and documentation. The results show that infographic displays that pay attention to the principles of nonverbal communication produce informative, professional, and neutral infographics. Meanwhile, the seating layout that is arranged by considering the aspects of nonverbal communication can produce a layout that can be accepted by all factions, thereby increasing the effectiveness of communication.

Keywords: *Nonverbal Communication, Plenary Session, Layout Design, DPR RI*

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai representasi rakyat, DPR RI bertanggung jawab dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (DPR RI, 2023). Dalam melaksanakan tugasnya, DPR RI terdiri dari berbagai alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi dan badan-badan yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. DPR RI terdiri dari 580 anggota yang berasal dari delapan partai politik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung kelancaran administrasi dan operasional DPR RI, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memiliki peran strategis dalam mengakomodasi kepentingan berbagai partai politik secara adil dan proporsional untuk menunjang efektivitas komunikasi. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mendukung kinerja para anggota dewan melalui penyediaan layanan administratif dan persidangan. (dpr.go.id, 2023). Salah satu aspek penting dalam mendukung jalannya persidangan adalah penyampaian informasi secara visual, baik melalui tayangan infografis maupun melalui pengaturan tata letak tempat duduk kursi Anggota DPR RI. Komunikasi yang efektif dalam lembaga pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, tuntutan terhadap transparansi dan efektivitas komunikasi di lembaga pemerintahan semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui hasil keputusan politik, tetapi juga ingin memahami bagaimana keputusan tersebut dibuat, siapa yang terlibat, dan bagaimana proses perumusannya berlangsung (Dunn, 2018). Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dalam ruang sidang DPR RI harus didukung oleh penyampaian informasi yang jelas, akurat, serta dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Infografis yang ditayangkan dalam Rapat Paripurna, memiliki peran strategis sebagai media penyampaian informasi kepada seluruh anggota rapat dan publik secara luas. Rapat Paripurna DPR RI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lembaga legislatif Indonesia. (dpr.go.id, 2023). Di sinilah berbagai kebijakan, undang-undang, dan keputusan penting yang berpengaruh bagi negara diputuskan oleh para wakil rakyat. Melalui tampilan infografis yang menarik dan informatif, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat membantu peserta rapat dan masyarakat memahami kebijakan dan proses yang sedang berlangsung di DPR. Selain itu, desain infografis yang netral dan tidak bias politik menjadi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang bersifat demokratis. Dalam konteks inilah, setiap infografis yang ditayangkan pada Rapat Paripurna menjadi krusial.

Tahun 2024 merupakan masa krusial bagi DPR RI karena pada waktu tersebut terjadi pembahasan isu-isu strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan pemerintahan. Isu-isu ini meliputi pembahasan rancangan undang-undang, penyusunan anggaran negara, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Tahun 2024 juga merupakan masa – masa transisi dari Anggota Legislatif Periode 2019 – 2024 ke Anggota Legislatif baru yaitu Periode 2024 – 2029 sehingga membutuhkan proses penyesuaian. Salah satu proses penyesuaian ini adalah penyusunan *layout* kursi anggota DPR RI Periode 2024 – 2029 yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan dapat diterima oleh seluruh fraksi sehingga tidak menimbulkan konflik dan menciptakan efektivitas komunikasi dalam Ruang Rapat Paripurna. Selain itu, masa transisi dari periode legislatif sebelumnya ke periode baru tidak hanya mencakup perubahan komposisi anggota DPR, tetapi juga mempengaruhi pola komunikasi dan strategi lobi antarfaksi. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan sistem informasi visual yang memadai sangat diperlukan untuk membantu anggota baru memahami mekanisme sidang dan mempercepat proses adaptasi mereka dalam lingkungan parlemen yang dinamis.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti tata letak ruang dan pengaruhnya dalam lingkungan korporasi atau pendidikan (Chaniago, 2016; Nafiah, 2016; Ummah 2020), tetapi belum banyak yang secara spesifik membahas dampaknya dalam konteks parlemen. Dalam desain ruang legislatif, tata letak tempat duduk dapat mempengaruhi pola komunikasi dan strategi lobi antarpertai politik. Posisi duduk yang memungkinkan kontak mata langsung atau

interaksi spontan dapat mempercepat proses negosiasi serta meningkatkan efektivitas diskusi. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan unsur komunikasi visual melalui infografis yang informatif serta memperhatikan aspek komunikasi nonverbal dalam tata letak kursi anggota DPR RI, perancangan ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan studi-studi sebelumnya. Dengan kombinasi komunikasi visual dan nonverbal, perancangan karya ini menjadi inovatif karena menawarkan solusi yang tidak hanya meningkatkan transparansi dan pemahaman publik, tetapi juga memaksimalkan efektivitas komunikasi internal DPR RI.

Dari fenomena masa transisi anggota legislatif baru, menghadirkan tantangan baru untuk dilakukan perancangan karya berupa tayangan infografis dan *layout* tata letak kursi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi dalam Rapat Paripurna. Oleh karena itu, penulis yang tengah melakukan kegiatan MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) pada posisi Assisten to MP's Expert Staff di Bagian Persidangan Paripurna Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlangsung selama empat bulan berinisiatif untuk menyusun Tugas Akhir Perancangan Karya dengan fokus mengoptimalkan tayangan infografis dan layout tempat duduk anggota pada Rapat Paripurna yang memperhatikan aspek komunikasi visual dan komunikasi non verbal untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal di Ruang Rapat. Dengan judul "Perancangan Tayangan Infografis dan Layout Tempat Duduk Pada Rapat Paripurna Anggota DPR RI Periode 2024-2029". Hasil perancangan karya ini diharapkan dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara anggota DPR RI dan publik, serta memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang transparan, demokratis, dan modern terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal merupakan proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui elemen seperti gestur, ekspresi wajah, kontak mata, tata ruang, warna, dan simbol visual. Menurut Knapp dan Hall (2023), komunikasi nonverbal berfungsi untuk melengkapi, mengkontradiksi, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi utama untuk menyampaikan makna, melalui penguatan komunikasi verbal, mengantikannya, maupun memberikan simbol alternatif. Jadi, inti dari teori ini adalah bagaimana pesan dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan elemen seperti bahasa tubuh, simbol visual, warna, dan tata letak. Teori komunikasi nonverbal diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi, seperti proksemik, kinesik, haptik, dan komunikasi artefaktual. Setiap dimensi memberikan kontribusi berbeda dalam memahami bagaimana elemen nonverbal dapat memengaruhi hubungan sosial, status, dan persepsi antarindividu dalam suatu lingkungan (Hall, 1966; Birdwhistell, 1970).

a. Proksemik

Proksemik merupakan studi tentang penggunaan ruang dalam komunikasi. Edward T. Hall (1966) menjelaskan bagaimana jarak fisik antara individu memengaruhi komunikasi. Hall mengidentifikasi terdapat empat zona jarak: intim, personal, sosial, dan publik. Dalam konteks tata letak tempat duduk DPR, zona sosial dan zona publik menjadi dominan, di mana jarak memengaruhi efektivitas diskusi dan dinamika politik antaranggota.

b. Kinesik

Kinesik, menurut Birdwhistell (1970), adalah studi tentang gestur, postur, dan ekspresi wajah sebagai elemen komunikasi. Dalam sidang DPR, gerakan tubuh seperti anggukan, gestur tangan, atau perubahan postur dapat mencerminkan persetujuan, penolakan, atau dominasi dalam diskusi.

c. Haptik

Haptics atau komunikasi melalui sentuhan, berperan dalam menciptakan kedekatan emosional atau menunjukkan otoritas (Burgoon et al., 2016). Dalam konteks DPR, sentuhan seperti jabat tangan antarfaksi dapat memperkuat kolaborasi atau mencairkan ketegangan.

d. Komunikasi Artefaktual

Komunikasi artefaktual adalah penggunaan benda atau elemen visual untuk menyampaikan pesan (Knapp & Hall, 2013). Dalam perancangan karya ini, desain infografis DPR, seperti warna netral dan penggunaan logo organisasi, bertujuan menciptakan suasana profesional dan menghindari bias politik.

Berdasarkan paparan teori komunikasi nonverbal dan dimensinya, dapat diketahui bahwa proksemik, kinesik, hapstik, dan komunikasi artefaktual memainkan peran penting dalam memahami dinamika komunikasi di Ruang Persidangan Paripurna DPR RI. Teori ini memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi bagaimana tayangan infografis dan *layout* tempat duduk anggota DPR RI Periode 2024-2029 memengaruhi efektivitas interaksi dan persepsi publik terhadap institusi.

B. Infografis

Infografis merupakan representasi visual dari data atau informasi yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Menurut Widiastuti dkk. (2021), infografis merupakan bentuk visualisasi data yang dirancang untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Krum (2014) dalam bukunya Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, infografis bertujuan untuk:

1. Menyederhanakan informasi kompleks, yaitu membuat informasi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami,
2. Meningkatkan retensi informasi: visualisasi data membantu audiens memahami dan mengingat informasi lebih baik dibandingkan teks saja,
3. Meningkatkan estetika komunikasi: menggunakan elemen desain seperti warna, ikon, dan tata letak untuk menarik perhatian.

Bagas (2025, dikutip dalam Widiastuti, 2018) menyebutkan bahwa dalam penerapannya, infografis dibagi menjadi dua jenis, yaitu infografis statis dan infografis dinamis (motiongraphic). Sedangkan komponen utama infografis terdiri atas:

1. Data: Informasi yang akan disampaikan (kuantitatif atau kualitatif).
2. Desain Visual: Elemen visual seperti warna, tipografi, dan grafik.
3. Narasi: Alur cerita atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens.
4. Relevansi dengan Judul

C. Layout

Menurut Soewardikoen (2021:32), *layout* merupakan pengaturan atau tata letak elemen-elemen desain yang tersusun dengan rapi untuk menarik perhatian pembaca. Menurut Samara (2014) dalam Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, tujuan utama *layout* adalah untuk mengorganisasi informasi, salah satunya mempermudah audiens memahami hubungan antara elemen-elemen.

Layout memiliki prinsip – prinsip seperti keselarasan yang mengatur elemen-elemen dengan rapi untuk menciptakan keteraturan (Lidwell et al., 2010), hirarki visual, yaitu elemen penting dibuat lebih mencolok, ruang kosong, yaitu area kosong yang digunakan untuk membantu fokus pada elemen utama dan menciptakan keseimbangan visual, serta konsistensi sebagai penggunaan gaya desain. Anggarianni & Nathalia (2020:74) menguraikan beberapa prinsip dasar dalam desain *layout*, yaitu :

1. Proporsi (*proportion*), yaitu prinsip yang menentukan keseimbangan antara panjang dan lebar suatu bidang gambar untuk menciptakan tampilan yang harmonis dan proporsional.
2. Keseimbangan (*balance*), yaitu prinsip yang menggambarkan kesamaan dari unsur – unsur tertentu.
3. Irama (*rhythm*), yaitu pengulangan dan gerak yang digambarkan dalam garis, tekstur, bentuk, maupun warna.
4. Kesatuan (*unity*), yaitu unsur – unsur yang saling berhubungan dengan baik serta mengandung makna yang menarik.

5. Point of interest, yaitu suatu fokus yang menjadi pusat perhatian yang dominan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Karya akhir ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2012), observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan responden. Teknik ini melibatkan aktivitas seperti mendengar, membaca, mencium dan menyentuh suatu hal. Dalam perancangan tayangan infografis dan *layout* tempat duduk pada Rapat Paripurna Anggota DPR RI Periode 2024-2029, metode observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana penulis terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati yaitu aktivitas Rapat Paripurna sebagai petugas tayangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses yang berlangsung. Observasi dilakukan dengan memperhatikan bagaimana infografis digunakan sebagai media komunikasi visual dan bagaimana tata letak tempat duduk mempengaruhi interaksi antar anggota dewan. Keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan rapat memungkinkan identifikasi hambatan teknis yang mungkin terjadi, seperti kesulitan dalam menayangkan infografis atau tantangan dalam interaksi antar fraksi akibat pengaturan tempat duduk yang kurang optimal (Creswell, 2018).

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan antara dua pihak untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab dengan tujuan membangun pemahaman mendalam mengenai suatu topik. Sugiyono (2021) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara tidak terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang lebih fleksibel dan eksploratif, memungkinkan penulis untuk menggali informasi secara mendalam sesuai dengan dinamika percakapan yang berkembang. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Afniwaty Tanjung selaku Kepala Bagian Persidangan Paripurna guna memperoleh wawasan terkait proses pembuatan tayangan infografis serta pengaturan *layout* tempat duduk anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna. Wawancara ini memberikan pemahaman langsung mengenai tantangan, prosedur, serta pertimbangan komunikasi yang diterapkan dalam merancang elemen-elemen visual dan tata letak ruang sidang, sehingga dapat menjadi landasan penting dalam perancangan karya ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, visual, atau digital yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2021), dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari arsip, laporan resmi, media visual, serta rekaman yang mendukung kajian penelitian. Dalam perancangan karya ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan referensi video dari Rapat Paripurna DPR RI sebagai bahan riset dan pengolahan ide dalam perancangan tayangan infografis serta *layout* tempat duduk anggota DPR RI.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pra Produksi

Pra-produksi merupakan tahapan awal dalam proses pembuatan tayangan infografis dan *layout* tempat duduk Rapat Paripurna. Pada proses penulisan ini, penulis melakukan dua kegiatan pra-produksi perancangan karya yaitu melakukan riset dan penyusunan konsep desain untuk tayangan infografis dan *layout* tempat duduk kursi Anggota Dewan. Berikut merupakan penjelasan mengenai kegiatan pada tahap pra-produksi:

a. Riset

Riset dilakukan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 September 2024. Riset dilakukan untuk mengumpulkan data – data primer menggunakan metode observasi. Pada teori komunikasi non verbal, terdapat dimensi *artifactual communication* (Knapp & Hall, 2023) yang menyatakan bahwa elemen visual seperti infografis dapat memengaruhi persepsi seseorang. Pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI

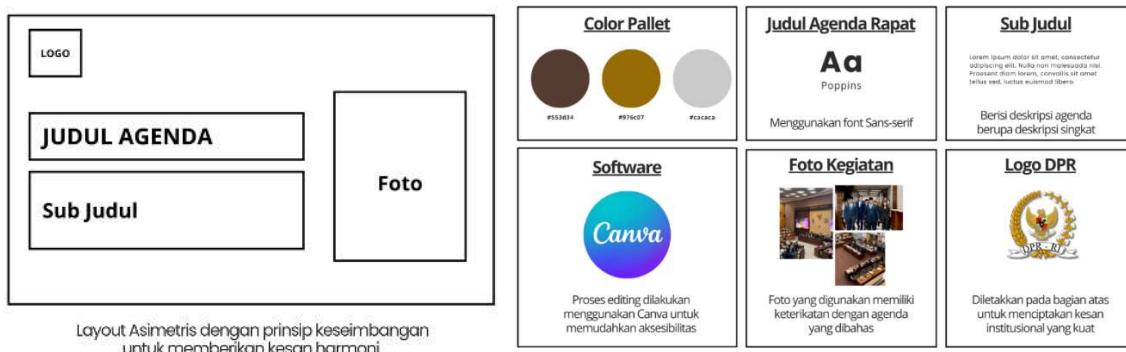
bersifat terbuka sehingga tayangan infografis dan informasi mengenai *layout* tempat duduk bukan hanya memengaruhi persepsi Anggota DPR RI itu sendiri, namun citra DPR RI secara umum di mata publik. Dokumentasi Rapat Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube @DPRRIOfficial pada Rapat Paripurna DPR RI Ke 14 - 22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 – 2024 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penonton *live streaming* mencapai 6,9 ribu . Hal ini tentu menjadi dasar bahwa tayangan infografis yang ditampilkan haruslah profesional dan netral.

Sedangkan pada pembuatan *layout* tempat duduk anggota DPR RI, penulis melakukan riset terkait aturan – aturan dan dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan karya. Dasar Hukum tentang jumlah dan komposisi anggota dalam alat kelengkapan dewan, anggota tiap-tiap fraksi, dan jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan, termuat dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Dari dasar hukum tersebut, pengaturan tata letak tempat duduk anggota DPR-RI di ruang Sidang Paripurna periode 2024 - 2029 akan diatur kembali secara khusus menggunakan prinsip yang diikuti secara umum. Prinsip yang harus diikuti secara umum adalah berdasarkan urutan Partai Politik Pemenang Pemilu dan berdasarkan proporsional jumlah kursi perolehan suara anggota legislatif dalam pemilu

b. Penyusunan Konsep Desain

Berikut merupakan konsep desain tayangan infografis yang dibuat penulis melalui *moodboard*:

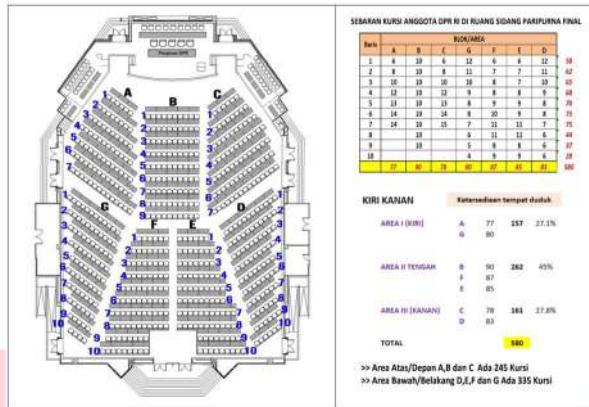
Layout Tayangan Infografis



Gambar 1 Konsep Desain Moodboard Tayangan Infografis
(Dokumen Pribadi Penulis, 2024)

Penulis menggunakan *moodboard* untuk membantu menentukan tema dan nuansa desain yang akan dibuat. *Moodboard* berfungsi untuk mempermudah menggambarkan konsep desain yang akan dibuat dalam tahap produksi nantinya. Selain itu, *moodboard* juga berfungsi untuk mempermudah penyampaian pesan. Desain infografis menerapkan layout asimetris dengan pembagian elemen yang jelas, di mana teks berada di sisi kiri dan foto di sisi kanan, sehingga menciptakan alur pandangan yang lebih terstruktur. Selain itu, tayangan infografis mengadopsi prinsip keseimbangan (*balance*) dengan memadukan teks, gambar, dan ruang kosong (white space) agar tampilan lebih harmonis. Logo DPR RI akan ditempatkan di bagian atas untuk memperkuat identitas institusional. Pendekatan desain yang formal dan minimalis dipilih guna membangun citra DPR RI yang profesional.

Penyusunan konsep layout dilakukan dengan menghitung sebaran kursi kemudian penyesuaian prinsip yang harus diikuti secara umum melalui perhitungan presentasi perolehan suara. Pada tahap ini, penulis juga melakukan penyusunan aturan – aturan atau *guideline* berdasarkan prinsip komunikasi non verbal untuk menciptakan *layout* yang tidak hanya proporsional namun juga dapat meningkatkan meningkatkan efektivitas komunikasi. Sehingga, hasil akhir *layout* dapat diterima oleh seluruh fraksi.



Gambar 2 Sebaran Ketersediaan Kursi
(Dokumen Pribadi Penulis)

B. Produksi

a. Produksi Desain Tayangan Infografis

Penulis melakukan eksekusi desain dari *mockboard* yang telah dibuat menggunakan aplikasi Canva Premium. Penggunaan Canva dimaksudkan untuk mempermudah akses desain kepada operator. Berikut merupakan hasil desain tayangan infografis:

Desain Tayangan Infografis 1



Hasil proses produksi infografis menggunakan tipografi sans serif jenis font Poppins yang jelas dan profesional, dengan kontras warna cokelat tua pada latar putih untuk meningkatkan keterbacaan. Tata letaknya seimbang dengan teks di sebelah kiri dan foto atau tabel di sebelah kanan, menciptakan alur pandangan yang jelas. Hierarki informasi tersusun rapi, dengan judul besar diikuti oleh tanggal dan agenda, serta penggunaan ruang kosong yang cukup untuk memberikan tampilan bersih. Kesan yang ingin diberikan penulis adalah desain ini menonjolkan netralitas melalui palet warna netral dan foto yang merepresentasikan formalitas tanpa keberpihakan. Profesionalitas terlihat dari desain minimalis, logo DPR RI yang memberikan konsistensi visual dan kesan institusional yang kuat, serta penempatan elemen secara sistematis. Sementara itu, unsur kebaruan dihadirkan penulis melalui penggunaan font modern, elemen grafis kontemporer, dan tata letak yang lebih dinamis dibanding desain konvensional. Secara keseluruhan, infografis ini efektif dalam menyampaikan informasi secara formal, netral, dan profesional,

b. Produksi Desain Tayangan Infografis

1. Membuat penyesuaian tempat duduk Anggota DPR RI

Hasil perhitungan dari Metode Fix adalah Partai PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi di depan dan Partai PKB, PKS, PAN, Demokrat mendapatkan 2 kursi di depan. Metode fixed memiliki keuntungan memberikan hasil pembagian kursi yang mudah dipahami sehingga menciptakan persepsi stabilitas alokasi kursi.

No.	Partai Politik	Kursi	Fixed
1	PDI-P	4.2	4
2	Golkar	3.9	4
3	Gerindra	3.3	4
4	Nasdem	2.6	2
5	PKB	2.6	2
6	PKS	2.0	2
7	PAN	1.8	2
8	Demokrat	1.7	2
		22	22

Penyesuaian Kursi bagian Atas ABC 245			
No.	Partai Politik	Kursi	Fixed
1	PDI-P	46.5	46
2	Golkar	43.1	43
3	Gerindra	36.3	36
4	Nasdem	29.1	29
5	PKB	28.7	29
6	PKS	22.4	23
7	PAN	20.3	20
8	Demokrat	18.6	19
		245	245

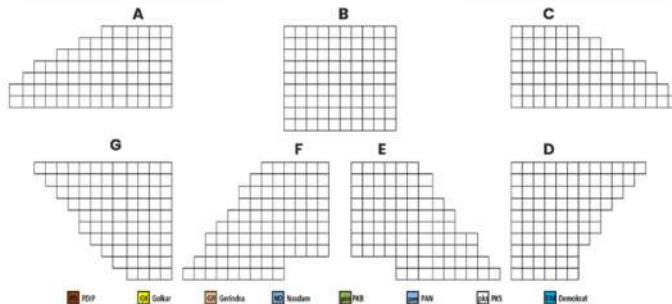
Penyesuaian Kursi bagian Bawah DEFG 335			
No.	Partai Politik	Kursi	Fixed
1	PDI-P	63.5	64
2	Golkar	58.9	59
3	Gerindra	49.7	50
4	Nasdem	39.9	40
5	PKB	39.3	39
6	PKS	30.6	30
7	PAN	27.7	28
8	Demokrat	25.4	25
		335	335

(Olahan Data Penulis, 2024)

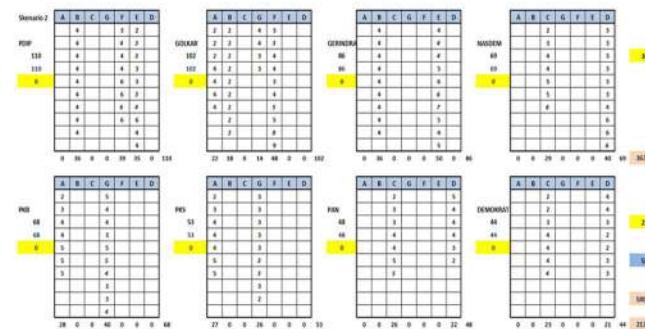
Jumlah fixed kursi diperoleh dengan cara membagi jumlah perolehan suara per partai politik dengan jumlah total perolehan suara keseluruhan dikali dengan kesediaan kursi yang ada. Sehingga mendapatkan hasil seperti tabel di atas. Pada bagian atas (ABC), fraksi PDIP memperoleh 46 kursi, fraksi Golkar memperoleh 43 kursi, fraksi Gerindra memperoleh 36 kursi, fraksi Nasdem memperoleh 29 kursi, fraksi PKB memperoleh 29 kursi, fraksi PKS memperoleh 23 kursi, fraksi PAN memperoleh 20 kursi, dan fraksi demokrat memperoleh 19 kursi. Sedangkan pada bagian bawah (DEF), fraksi PDIP memperoleh 64 kursi, fraksi Golkar memperoleh 59 kursi, fraksi Gerindra memperoleh 50 kursi, fraksi Nasdem memperoleh 40 kursi, fraksi PKB memperoleh 39 kursi, fraksi PKS memperoleh 30 kursi, fraksi PAN memperoleh 28 kursi, dan fraksi demokrat memperoleh 25 kursi. Setelah itu, penulis melakukan pengurutan tempat duduk Partai dengan berbagai kemungkinan konfigurasi yang dapat dilakukan. Hasilnya sebagai berikut:

c. Pembuatan Layout Tempat Duduk

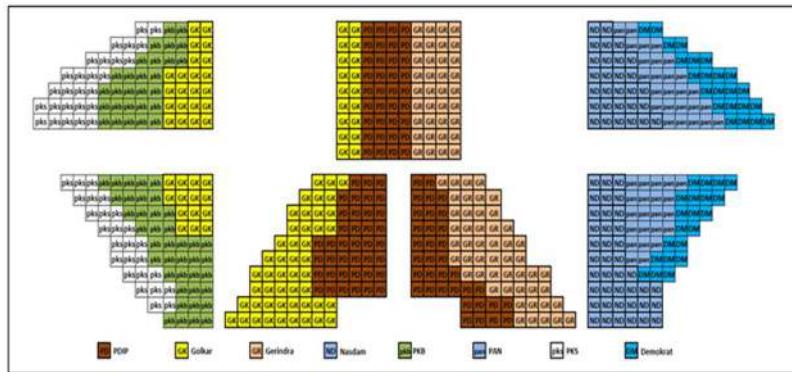
Dump layout digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan posisi tiap partai dalam ruang sidang, memungkinkan evaluasi lebih lanjut guna memastikan keteraturan, keseimbangan visual, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar fraksi dalam sidang parlemen.



Gambar 3 Dump Layout Kosong Ruang Rapat Paripurna

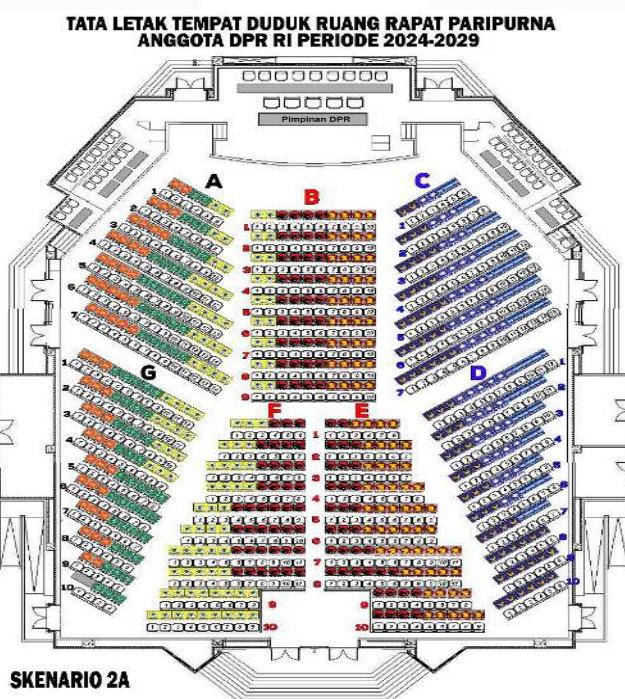
Gambar 4 Matriks Sebaran Perhitungan Skenario 2A
(Dokumen Pribadi Penulis, 2024)

Gambar di atas merupakan hasil matriks sebaran pada perhitungan skenario 2A. Matriks tersebut digunakan untuk menentukan distribusi tempat duduk berdasarkan proporsi perolehan suara partai politik. Hasil matriks ini kemudian menjadi dasar dalam visualisasi *dump layout*, yaitu representasi grafis dari tata letak tempat duduk anggota DPR RI yang telah disusun sesuai dengan skenario yang dirancang. Berikut merupakan visualisasi matriks skenario ke dalam *dump layout*:



Gambar 5 Hasil Visualisasi Skenario 2A
(Dokumen Pribadi Penulis, 2024)

Gambar di atas merupakan hasil visualisasi Skenario 2A, yang didasarkan pada perhitungan sebaran matriks untuk menentukan distribusi tempat duduk anggota DPR RI sesuai dengan perolehan suara partai politik. Dalam skenario ini, Fraksi Golkar ditempatkan di sebelah kiri Fraksi PDIP, sementara Fraksi Gerindra berada di sebelah kanan Fraksi PDIP. Berbeda dengan Skenario 2B, yang justru menukar posisi kedua fraksi tersebut, yaitu menempatkan Fraksi Golkar di sebelah kanan dan Fraksi Gerindra di sebelah kiri Fraksi PDIP. Perbedaan tata letak ini bertujuan untuk mengeksplorasi alternatif pengaturan yang tetap mempertimbangkan proporsionalitas, efektivitas komunikasi antar fraksi, serta keseimbangan politik dalam ruang sidang DPR RI.



d. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil perancangan karya penulis mengenai perancangan tayangan infografis dan layout tempat duduk pada Rapat Paripurna anggota DPR RI Periode 2024-2025, dapat disimpulkan bahwa dengan mengaplikasikan teori komunikasi nonverbal oleh Knapp & Hall (2006), seperti komunikasi artefaktual, haptiks, kinesik, dan proksemiks, infografis dan *layout* tempat duduk anggota dapat dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks formal yang kompleks. Tayangan infografis yang dirancang menggunakan prinsip keseimbangan visual dan hierarki informasi berhasil menyampaikan pesan secara profesional dan netral, memastikan bahwa semua informasi penting dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pihak tanpa menimbulkan kesan partisan. Sementara itu, perancangan *layout* tempat duduk anggota DPR RI tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai medium komunikasi nonverbal yang mendukung interaksi sosial dan politik sehingga hasil *layout* dapat diterima oleh seluruh fraksi. Susunan kursi yang strategis mendukung komunikasi nonverbal, seperti lobi politik, dan interaksi simbolis melalui gestur atau sentuhan, yang secara signifikan berkontribusi pada terciptanya dinamika politik yang lebih harmonis dan efisien.

REFERENSI

- Ambrose, G., & Harris, P. (2015). *Basics Design 01: Design Thinking*. London: Bloomsbury Publishing.
- Anggraini, S., & Nathalia, K. (2018). *Desain Komunikasi Visual*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Apriadi, I. L. (2022). *Perancangan Motion Infografis Untuk Kampanye Sosial Upaya Mencegah Dampak Negatif Akibat Duduk Terlalu Lama Pada Remaja Di Kota Bandung*. Universitas Telkom, 1-15.
- Birdwhistell, R. L. (2010). *Kinesics and Context: Essay on Body Motion Communication*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Burgoon, J. K., Manusov, V., & Guerrero, L. K. (2021). *Nonverbal communication* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Cairo, A. (2016). *The functional art: An introduction to information graphics and visualization*. Barkeley, CA: New Riders.
- Carter, R., Day, B., & Meggs, P. B. (2018). *Typographic Design: Form and Communication* (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Chaniago, H. (2016). *Manajemen kontemporer*. Jakarta: Arimbi Press.
- Coleman, S. (2020). *Parliament in the digital age: Communication, representation, and transparency*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI* (Peraturan No. 1/2020). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256012/peraturan-dpr-no-1-tahun-2020>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan* (Peraturan No. 2/2020).
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). New York: Routledge.
- Fatmawati, N. (2021, Juni 25). *Berkomunikasi secara efektif: Ciri pribadi yang berintegritas dan penuh semangat*. KPKNL Semarang. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13988>.
- Hall, E. T. (1990). *The Hidden Dimension*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
- Irfansyah, M., Razzaq, A., & Hidayat, H. H. T. (2023). Analisis pesan-pesan dakwah pada Thoha TV. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(1), 351–360.

- Knapp, M. L., Hall, J. A., & Horgan, T. G. (2023). *Nonverbal communication in Human Interaction* (9th ed.). Canada: Thomson Wadsworth.
- Kompas.id. (2024, September 30). *DPR 2024-2029 dilantik: Jaga kepercayaan publik*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/30/dpr-2024-2029-dilantik-jaga-kepercayaan-publik>.
- Krum, R. (2013). *Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Lupton, E. (2017). *Design is Storytelling*. New York: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum.
- Mehrabian, A. (1972). *Nonverbal communication*. Chicago: Aldine-Atherton.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). London: Routledge.
- McQuail, D. (2012). *McQuail's Mass Communication Theory (6th Edition)*. London: SAGE Publications.
- Nafiah, D. (2016). *Penataan ruang kantor dalam menunjang efektivitas pekerjaan kantor*. Yogyakarta: ResearchGate Publishing.
- Onong Uchjana Effendy, M. (2019). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.\
- Pandrianto, N., & Sukendro, G. G. (2018). *Analisis Strategi Pesan Content Marketing untuk Mempertahankan Brand Engagement*. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 167–176.
- Parliament of Canada. (2021). *Augmented reality and data visualization in legislative communication*. *Journal of Parliamentary Studies*, 15(2), 45-60.
- Paripurna, B. P. (2023). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Diambil kembali dari dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Tentang-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>
- Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 17/2014)*.
- Samara, T. (2023). *Making and Breaking the Grid, Third Edition: A Graphic Design Layout Workshop*. New York: Rockport Publishers.
- Soewardikoen, D. W. (2021). *Metodologi Penelitian Desain Komunikasi Visual* (Edisi Revisi, Cetakan pertama). Sleman: Kanisius.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Swastiko, B. Z. (2025). *Perancangan Infografis Sebagai Media Informasi Mengenai Bahaya Judi Online Bagi Remaja* (Skripsi, Universitas Telkom). Universitas Telkom.
- Ummah, R. (2020). *Implementasi Tata Ruang Kantor dalam Menunjang Efisiensi Kerja*. Semarang: Walisongo University Press.
- Widiastuti, Rosarita Niken dkk. (2020). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat. Tersedia dalam: https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/2997/Memaksimalkan_Penggunaan_Media_Sosial_dalam_Lembaga_Pemerintah.pdf
- William Lidwell, K. H. (2010). *Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design*. . Baverly: Rockport Publishers.

